

REFERENCES

- Betik, N. (2017). *An Analysis on Politeness Principl Used by Students in Research in English Languange Teaching 1 in classrooms Discussion*. Retrieved from <http://e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id/2353/1/skripsi%20fix.pdf> (November 12, 2019)
- Cook, Guy. (1990). *Discourse*. Oxford: Oxford University Press.
- Hidayati, S. (2017). *The Flouting of Politeness Principles in The Debates of Jakarta Regional Election in 2017: A Pragmatic Approach* Retrieved from http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/ZmFiYzRkZDJiODU5ZTc5OTczOGVIMjdmMzgyMjcyZDJmMGUzNDM5Zg==.pdf (November 12, 2019)
- Leech, Geoffrey. (1983). *Principles of Pragmatics*. London: Longman Group Limited.
- _____. (2014). *The Pragmatics of Politeness*. New York: Oxford University Press.
- Levinson and Stephen C. 1983. *Pragmatics*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Litosseliti, Lia. (2010) *Research Methods in Linguistics*. London: Continuum International Publishing Group
- Mansoor, Imam Kareem. (2018). Politeness: Linguistic Study. *International Journal of Research in Social Sciences and Humanities*. 8(4). 167-179.
- Miles, Huberman. (1994). *Qualitative Data Analysis: second edition*. SAGE Publications: International Educational and Professional Publisher
- Mulyono, E. (2016). Politeness Principle an Analysis in Cartoon Movie Entitled Stand By Me Doraemon. *Premise Journal*, (5), 9-23.

Sandra, Angraini Puspita. (2010). *A Politeness Maxims Analysis on The Dialogue of Date Night Movie*. Retrieved from <http://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/4144> (November 25, 2020)

Wijayanto. Tri. (2014). *A Pragmatic Analysis of Politeness Strategy in The Coursebook: Look Ahead 2 An English Course For Senior High School Students Year XI*. Retrieved from <http://eprints.uny.ac.id/1/Tri%Wijayanto%200920223302.pdf> (November 15, 2019)

Yule, G. (1996), *Pragmatics*. Oxford: Oxford University Press.

APPENDICES

PART 2

Najwa: Ya, yang tadi kita saksikan sama-sama adalah deretan jumlah Perpu yang dikeluarkan tiap Presiden di negeri ini. Tidak ada satu pun tuh yang makhzulkan karena Perpu. Mari kita kembali diskusi. Prof Emil Salim, anda diundang Presiden untuk memberikan masukan.

Emil: Iya.

Najwa: Apa yang anda tangkap baik dari pernyataan tersurat maupun tersirat oleh Presiden tentang situasi ini?

Emil: Pertama beliau menghadapi fakta bahwa ada RUU tentang KPK. Kami berpendapat keliru isi dari RUU KPK yang intinya melemahkan KPK. Tidak ada instansi dari pemerintah sejak proklamasi yang berhasil seperti KPK. Ketua Mahkamah Konstitusi ditangkap, ketua DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPR, ketua partai, macam-macam. Itu dilakukan oleh KPK terhadap oknum-oknum partai politik, yang hanya KPK berani berbuat. Karena itu, tiap usaha memperlemah KPK kami anggap melawan garis kebijakan Presiden yang ingin membangun pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Jadi persoalannya adalah isi dari perpu melemahkan KPK.

Najwa: Isi dari UU, eh revisi?

Emi: Revisi, eh keduanya. Itu yang kita tentang. Kalau KPK berhasil sehingga memberantas korupsi, mengapa diperlemah, mengapa diangkat Dewan Penasehat, mengapa?

Najwa: Oke, Presiden menangkap, ketika berbicara Presiden menangkap kekhawatiran itu?

Emil: Dia (Presiden) menangkap. Jadi beliau berkata *soal saya adalah semua partai mendukung RUU KPK itu*. Jadi saya menangkap beliau itu berdiri sendiri, partai pendukung beliau yang memilih beliau, omong kosong, tidak ada yang mendukung. Kalau betul, kalau betul partai pendukung Presiden Jokowi ingin membantu supaya Jokowi berhasil, kenapa menyetujui RUU yang memperlemah KPK, sedangkan KPK terbukti berhasil memberantas?

Najwa: Oke.

Arteria: Saya jawab ya?

Najwa: Sebentar.

Arteria: Iya iya.

Najwa: Prof, dalam konteks, kemudian sekarang saya ingat saya pernah membaca, ada pernyataan Pak Jokowi yang bilang “saya kan tidak punya fraksi di DPR”. Konteksnya apa ketika menyampaikan itu? Apakah memang itu pengakuan bahwa sedang dikeroyok DPR?

Arteria: (tertawa)

Emil: Implisit berkata semua partai mendukung RUU KPK itu. Beliau sendiri, berdiri sendiri. Mana partai-partai yang sok membantu beliau?

Najwa: Sok?

Emil: Iya.

Johnny: Terima kasih prof. Yang pertama Nana sebelum ke prof saya harus luruskan dulu ya. Bahwa tidak ada partai politik, khususnya kami, Nasdem yang menolak Perpu.

Emil: (mengacungkan tangan)

Johnny: Sabar dulu, sabar dulu. Satu satu, satu satu prof. yang menolak Perpu. Kami tau Perpu konstisional, kami tau legislatif review konstisional, kami tau judicial review konstisional. Tiga-tiganya konstisional. Kalau Presiden yang punya kewenangan menggunakan Perpu, silahkan urusan Presiden, nanti proses politiknya ada di DPR. Kalau tanya sama kami, kewenangan pembuat UU itu ada 2, yang 1 legislatif review normalnya, yang 1 melalui Perpu. Yang ketiga melalui society. Ada jalurnya judicial review, silahkan juga nanti MK yang final dan mengikat. Itu yang pertama. Kami dari awal sudah menyampaikan itu kewenangan Presiden, namun kalau ditanya pada kami, pilihan yang mana, kalau Presiden tanya, bilang Presiden masyarakat itu ada dua pendapatnya, yang satu menolak revisional UU KPK dan ada juga yang mendukung

UU KPK. Kalau untuk itu agar final dan mengikat, silahkan tempuh jalur yudisial review yang juga ditempuh oleh masyarakat. Silahkan.

Najwa: Saya mau minta ..

Johnny: Terkait yang disampaikan oleh ..

Najwa: Sebentar. Sebelum kesana bang Johnny. Jadi anda mau menegaskan kalau malam ini, setelah nonton Mata Najwa, Presiden tandatangan Perpu ...

Johnny: Ya silahkan, proses lanjutan

Najwa: Nasdem mendukung?

Johnny: Isi Perpu apa? Kita lihat isinya apa, yang bisa dilihat secara politik, silahkan.

Najwa: Bisa diterima secara politik,

Johnny: Tetapi kita belum tau apa yang akan diisi atau dimuat Perpu saat ini, kewenangan itu ada pada Presiden.

Najwa: Itu bukan,

Johnny: Itu satu. Saya mau jawab prof secara langsung.

Emil: (tertawa)

Johnny: Tadi disampaikan bahwa tidak prof. Kami berdiskusi dengan Presiden. Kami tidak inginkan Presiden salah juga. Kami inginkan, kami dukung

Presiden melakukan dengan benar-benar. Ingat prof ya, pembuat UU bukan cuma DPR. UU tidak mungkin disahkan menjadi UU apabila dikerjakan sendiri oleh DPR. Itu penyesatan public jika dilakukan.

Najwa: Sebentar, saya mau menerjemahkan.

Johnny: Karena UU hanya bisa dikerjakan bersama-sama. DPR dan public dan melalui mekanisme yang panjang termasuk partisipasi public.

Najwa: Ketika Pak Jokowi mengatakan ia merasa sendiri, tidak didukung oleh partai politik, apa yang anda tangkap tentang itu?

Johnny: Tanyakan pada Pak Jokowi konteksnya apa, saya tidak tau. Tetapi saya mau meluruskan bahwa bukan sendirian DPR. Secara konstitusi tidak mungkin DPR bisa buat UU sendiri. Presiden bisa menerbitkan Perpu sejauh disetujui tindaklanjutnya oleh DPR, kalau tidak DPR bisa menolak.

Emil: (mengacungkan tangan)

Najwa: Silahkan prof.

Johnny: Jadi jangan salah arahnya.

Emil: Saudara keliru. Yang dikatakan oleh Presiden *semua partai mendukung RUU KPK*,

Johnny: Betul kami dukung karena tidak dijadikan UU. Tapi tidak berarti pemerintah tidak setuju itu professor. Itu yang saya katakan.

Emil: Tetapi beliau berkata partai yang mendukung saya, pemerintah, ikut mendukung RUU yang saya ada revisinya.

Johnny: Betul itu karena UU disahkan. Itu tidak ada yang salah.

Emil: Karena itu beliau (Presiden) tidak mau mensahkan dulu dan mencari jalan keluarnya.

Johnny: Kalau mencari jalan lain lagi prof. Tadi kita bilang ada tiga jalurnya. Kalau Presiden, dia bilang tadi saya akan kalkulasi, saya akan periksa. Kalau itu keputusannya, keputusan Presiden, kami dukung Presiden. Kami dukung itu prof.

Najwa: Baik, baik.

Emil: Tapi saudara mendukung RUU

Johnny: Tapi saat ini belum dilakukan oleh Presiden.

Emil: Baik, silakan bang Feri.

Feri: Soal revisi UU KPK beliau (Presiden) sudah menjelaskan isinya bermasalah. Siapa yang salah dalam hal ini, segerombolan partai politik yang sepuluh itu dan Presiden yang menyetujui rencana itu sehingga jadi UU. Semuanya khilaf. Presiden melihat itu khilaf, kenapa? Public menolak.

Najwa: Apakah cocok khilaf? Khilaf itu seolah-olah tidak berdaya tanpa sengaja. Ini kan kesengajaan?

Feri: Ini disengaja lalu kemudian mereka baru sadar ternyata ditolak bahkan ada korban nyawa. Lalu Presiden mungkin saja sebagai kepala negara dan kepala pemerintah merenung, langkah-langkah dia yang salah itu. Selama ini kan sepuluhnya mendukung, ternyata salah dimata public. Presiden mau berdiri dimana? ikut mendukung sepuluh partai atau kemudian mendukung korban atau public yang menolak.

Arteria: (mengacungkan tangan)

Najwa: Oke bang Feri, saya ingin bertanya beralasan tidak kekhawatiran Presiden? Kalau kita tadi menangkap Presiden khawatir tidak akan didukung oleh fraksi dari partainya?

Feri: Sangat beralasan.

Najwa: Beralasan?

Feri: Sangat beralasan. Karena apa? Karena hal ikhwal kegentingan memaksa itu ada tiga hal di UU.

Arteria: Apa itu?

Feri: Pertama, keadaan sosial masyarakat yang membutuhkan solusi cepat.

Kedua, kondisi kekosongan hukum atau ada hukum yang kosong.

Arteria: Iya, yang mana itu?

Najwa: Oke.

Feri: Sabar. Biar anda ngerti juga.

Arteria: Anda ngomong terus seolah-olah Anda pintar tapi gak pintar, salah terus ini.

Feri: Atau ada hukum tetapi tidak menyelesaikan masalah.

Najwa: Oke, kita dengarkan dulu.

Feri: Ketiga, kemudian Perpu itu bisa dilahirkan karena proses legislasi biasa itu memakan waktu yang panjang.

Najwa: Oke.

Feri: Itu yang tidak dijelaskan oleh saudara Arteria Dahlan.

Arteria: (mengacungkan tangan)

Najwa: Oke, saya kasi kesempatan untuk menanggapi. Bergantian, kalau dua-duanya berbicara tidak ada yang bisa mendengarkan.

Feri: Karena dia fungsinya memang untuk mengacaukan suasana saja. Jadi,

Arteria: Woy, belajar dulu kamu ya. Belajar. Jangan merasa paling pintar.

Najwa: Sebentar, sebentar. Gantian bicaranya. Sudah selesai bang Feri?

Feri: Belum.

Arteria: Jangan seolah-olah pintar.

Feri: Jadi yang tiga hal itu yang akan menjadi refleksi bagi Presiden, apakah memang hal ikhwal kepentingan mema ksa sudah terwujud? Faktanya,

Arteria: Apa faktanya?

Feri: Faktanya banyak public yang resah, lalu timbul korban nyawa

Arteria: (lololololo)

Najwa: Oke.

Feri: Mbak Nana bayangkan ada 4 Perpu yang diterbitkan Pak Presiden, Perpu soal KPK ketika Abraham Slamet dan BW jadi tersangka, Perpu informasi pajak, Perpu Kebiri, Perpu ormas, semuanya tidak pernah memakan korban dan terbitkan Perpu. Hari ini ada korban, apa salahnya Presiden?

Arteria: Ini ahli apa sih ini?

Najwa: Oke, kita dengarkan. Silahkan bang Arteria ditanggapi.

Arteria: Prof, saya ingin katakan itu kelemahannya dimana? Berhasil dan tidak berhasilnya KPK prof yang tau kami, kenapa begitu prof? Begitu 2015 dia terpilih, dia buat grand desain, dia buat roadmap isinya janji-janji apa yang harus dia kerjakan. Public ini tidak tau, public ini terhipnotis dengan OTT –OTT seolah-olah itu hebat padahal janji-janji KPK itu banyak sekali di hadapan DPR yang sama sekali kita katakana 10% pun belum tercapai hingga saat ini. Ini pertama ya prof.

Emil: Apa semua ketua partai yang masuk penjara, apa itu tidak bukti keberhasilan KPK?

Arteria: Itu sebagian saja. Prof dengan segala hormat saya sama professor, professor bacalah tugas fungsi kewenangan KPK. Tidak hanya melakukan penindakan,

Emil: Tapi hukum telah dijatuhkan

Arteria: Tapi bagaimana pencegahannya, bagaimana penindakannya, bagaimana juga supervisi, monitoring dan koordinasi, ini kan tidak dikerjakan prof. Itu yang pertama prof, tolong jangan dibantah dulu.

Najwa: Oke, kita dengarkan dulu prof.

Arteria: Kemudian yang kedua prof. Saya ingin katakan kenapa kami misalnya buat Dewan Pengawas, saya ingin sampaikan nih, biar prof juga jelas. Kita bicara hukum sama ahli hukum, bicara hukum pidana korupsi sama ahli pidana korupsi, bukan saya mendiskriminasikan prof. Biar gak ada yang begini prof (sambil menunjukkan lembaran kertas). Berita acara sita rampas, emas batangan diambil seolah-olah title KPK kemudian uang dirampas tapi ternyata gak masuk di kas negara. ini gunanya Dewan Pengawas. Itu ada buktinya (sambil menunjuk ke kamera). Berdiri sini. Ini dia buktinya. Kemana uang itu?

Najwa: Anda menunjukkan bukti. Anda nunjuk ke siapa?

Arteria: Sini, sini. Berdiri.

Najwa: Sebentar, sebentar. Saya yang berhak memanggil orang untuk naik ke panggung saya. Tunggu dulu disitu baPak baru saya akan cek dulu anda

siapa, karena tidak bisa sembarangan orang masuk. Jadi saya cek anda siapa. Silahkan dilanjutkan.

Arteria: Ini buktinya. Kemudian berbicara KPK gadungan ternyata pada saat pemeriksaan itu prof semua orang dipanggil, kamu mau dipanggil apa gak dipanggil? Kalau gak dipanggil, kamu serahin nih harta-harta kamu. Tiba-tiba ketahuan dan ketangkap dibilang itu KPK gadungan padahal bukan KPK gadungan. Namanya mau saya sebutin ada semua. Ini prof ya. Nah, prof orang Sumatera Barat saya buktikan lagi. Ini ada kasus 6 triliun dana bencana, kemudian juga masalah **koni**, kemudian masalah pasar gak pernah diangkat. Kenapa? Dicek lagi, aPakah ada serah terima penyerahan kebun sawit, motor-motor besar, siapa yang menerimanya tanyakan pada beliau.

Najwa: Oke.

Arteria: Ini yang saya katakan. Inilah yang ingin kita coba, kita hargai capaian-capaian KPK prof.

Emil: Iya.

Najwa: Baik.

Arteria: Tapi kita tidak boleh menutup mata kalau memang harus ada pembenahan terkait dengan KPK.

Emil: Sedikit, sedikit. Begini bung. Di dalam aturan UU KPK ada kewajiban menyampaikan laporan,

Arteria: Tidak pernah dikerjakan prof. Prof tau gak,

Emil: Tiap tahun dia menyampaikan.

Arteria: Mana prof?

Feri: Mbak, mbak Nana.

Arteria: Gak boleh begitu prof, saya ini DPR saya yang tau. Mana?

Emil: (tertawa)

Najwa: Oke, oke.

Arteria: Prof sesat.

Feri: Mbak Nana.

Arteria: Ini namanya sesat.

Najwa: Oke.

Feri: Alasan menariknya kan begini, KPK butuh Dewan Pengawas,

Arteria: Sesat. Salah itu prof.

Najwa: Bentar, kita dengarkan.

Feri: Sehingga kemudian karena kerja KPK bermasalah itu disebabkan,

Arteria: Bukan, kamu tau apalagi?

Najwa: Sebentar, sebentar. Ini bukan di DPR, semua orang menghargai pembicaraan.

Arteria: Kamu tau apalagi?

Najwa: Sebentar bung Arteria. Sebentar.

Feri: KPK kinerja bermasalah.

Arteria: Saya tidak mau ada ruang penyesatan, itu saja.

Feri: (tertawa)

Najwa: Sebentar. Ketika anda berbicara semuanya mendengarkan.

Arteria: Tidak, kalimatnya juga gerombolan anggota DPR. Kamu siapa? Saya
katakan begitu

Feri: Saya rakyat Indonesia.

Arteria: Betapa terhormatnya kamu. Jangan bicara rakyat, kamu ikut pemilu
dulu. Kalau kamu ikut pemilu, kamu dipilih, kamu wakil rakyat
Indonesia.

Feri: Anda dengarkan juga saya.

Arteria: Jangan bicara wakil rakyat kamu.

Feri: Jadi mbak Nana,

Arteria: Rakyat dari mana? Ubah kalimatmu.

Feri: Alasannya KPK bermasalah kinerjanya. Oleh karena itu, butuh Dewan
Pengawas. Emang DPR benar kinerjanya? Kenapa tidak ada Dewan
Pengawasnya? Setiap tahun,

Arteria: Baca dong. Waduhh

Feri: Setiap tahun proleknas tidak pernah terpenuhi.

Arteria: Ini ahli tata negara tidak baca.

Feri: Tidak pernah 10% pun proleknas terpenuhi.

Arteria: Ahli tata negara apa kamu?

Feri: Tetapi tidak pernah KPK itu diawasi dan tidak pernah ada rencana pembubarannya.

Najwa: Oke.

Feri: Kita mendukung KPK karena sederhana karena KPK selalu ingin dimatikan oleh para politisi dan kita yakin KPK sudah dijalur yang benar.

Arteria: uhhhh

Najwa: Oke.

Feri: Karena apa? Sejarah menyatakan begitu.

Najwa: Oke. Kita akan kembali setelah pariwisata. Tetap di Mata Najwa, kami kembali sesaat lagi.

PART 4

Najwa: Apakah Perpu memang akan menjadi simalakama, diambil mati tidak diambil mati, itu menurut Pak Moeldoko (Kepala Staf Kepresidenan). Saya juga harus sampaikan bahwa kami mengundang perwakilan istana namun tidak ada yang bersedia hadir, tidak ada yang sempat hadir di Mata Najwa untuk membahas ini. Ada satu pernyataan yang dikeluarkan oleh PLH Menteri Hukum dan HAM yaitu Pak Cahyo Kumolo yang mengatakan bahwa “sedang masih dipertimbangkan oleh Presiden” dan dia tidak bisa hadir karena menjelang masa-masa akhir jabatan menteri tidak diperbolehkan mengambil dan berbicara keputusan yang strategis. Jadi kita masih dalam masa transisi sampai kemudian nanti ada pemilihan cabinet yang berikutnya. Baik buah simalakama atau tidak, yang jelas lembaga survey Indonesia melakukan polling. Bertanya ke public apa hasilnya?

Djayadi: Bertanya ke public itu penting. Saya kira bapak-bapak disini tadi sepakat bahwa suara public penting dan kita juga paham ada pro-kontra dipublik. Tetapi kalau kita lihat fenomena yang ada yaitu seperti penolakan atau kontra terhadap revisi UU KPK ini terlihat meluas. Kita ingin tahu apakah itu mewakili public yang lebih luas lagi, apakah mahasiswa lalu suara dari Pof. Emil Salim dan sebagainya itu mewakili public yang lebih luas lagi. Kita tanya dengan cara survey untuk mewakili public secara nasional dan hasilnya adalah bahwa 70% lebih dari public yang mengetahui revisi UU KPK itu yang mengikuti isu-isu itu menyatakan

seperti kata Por. Emil Salim tadi revisi UU yang baru disahkan oleh DPR bersama pemerintah itu dianggap melemahkan KPK.

Najwa: Kita akan keluarkan grafisnya. Jadi 70, persisnya 70,9% ya?

Djayadi: Ya, 71 lah.

Najwa: 71% menganggap revisi UU ini melemahkan KPK.

Djayadi: Melemahkan. Lalu berikutnya kita tanya lagi, kalau itu melemahkan apa jalan keluarnya? Dan jalan keluarnya itu sudah berkembang di public, jadi kita tanya juga apakah salah satu jalan keluar yang banyak berkembang adalah soal Perpu. Dari yang tau itu lebih banyak lagi yang menyatakan perlu Perpu itu 76,3%.

Najwa: Kita akan keluarkan grafisnya. Jadi 76,3% setuju Presiden keluarkan Perpu.

Djayadi: Iya betul. 70,9 itu menganggap revisi itu melemahkan, 76,3 itu menganggap Presiden perlu mengeluarkan Perpu. Mengapa mengeluarkan Perpu, balik lagi ke pertanyaan awal lagi karena dianggap melemahkan. Jadi kalau ditanyakan Perpu yang mana, sudah jadi fakta politik bahwa revisi UU itu sudah disahkan tinggal menunggu secara administrative untuk menunggu tanggal 17 oktober berlaku secara otomatis atau ditandatangani oleh Presiden. Jadi saya kira disitu relevansi dari pertanyaan ini. Tinggal sekarang tentu saja kita sebagai negara demokrasi ada pembuat UU ada yang punya aspirasi, rakyat itu

aspirasi terhadap UU itu. Jadi tinggal bagaimana pembuat UU termasuk Presiden dalam hal ini mempertimbangkan aka nada Perpu atau tidak.

Najwa: Oke.

Supratman: Aku mau tanya 1 hal. Ada tidak pertanyaan menyangkut soal materi mana yang dianggap itu melemahkan dalam survey yang dilakukan itu? Poin mana di dalam revisi itu yang dianggap melemahkan sehingga public tau, tidak sekedar ditanya ini melemahkan atau tidak. Apakah pengetahuan public soal materi revisi itu mereka pahami secara menyeluruh UU revisi itu atau tidak. Jadi penting untuk kita uji.

Djayadi: Iya. Tidak ada pertanyaan itu.

Supratman: Kalau tidak ada,

Djayadi: Sebentar. Kita menanyakan apakah anda mengikuti dan mengetahui revisi UU KPK?

Supratman: Maksud saya tapi pertanyaan berikutnya,

Djayadi: Tetapi begini, seringkali politisi juga mengutip survey sebelumnya dari satu lembaga Kompas kalau tidak salah. Disitu juga ada 60% public itu menginginkan,

Supratman: Revisi?

Djayadi: Bukan. Yang menginginkan revisi. Yang setuju revisi itu 44,9%

Supratman: Iya betul.

Dhayadi: Tidak setuju 39,9%. Tetapi apa isinya itu antara lain misalnya penyadapan tidak perlu ijin kepada Dewan, tidak perlu ijin dalam bahasa itu. Itu 60% mengatakan begitu. KPK perlu independenitu juga sekitar 60%.

Supratman: Independen kan tetap independen. Secara tegas di UU revisi itu KPK independen walaupun dia masuk di dalam rumpun kekuasaan eksekutif karena itu keputusan MK.

Najwa: Bang Suprtman ketika anda tadi menanyakan itu artinya anda tidak merasa survey ini tidak mencerminkan keinginan public?

Suprtaman: Bukan, supaya public juga tau apakah memang pengetahuan orang soal setuju atau tidak revisi itu benar-benar paham soal materinya. Karena kalau dianggap menyangkut soal pelemahan, saya hanya ingin menggarisbawahi satu hal, sebenarnya dilemahkan itu dimana? Kalau menyangkut soal ijin ke Dewan Pengawas, sebelum KPK melakukan penyadapan juga ada, dia harus melapor ke komisioner. Tidak otomatis penyidik KPK itu langsung melakukan penyadapan tanpa lewat mekanisme kepada komisioner. Kita haya pindahkan dari komisioner itu ke Dewan Pengawas.

Najwa: Oke.

Arteria: (mengacungkan tangan)

Supratman: Dan jangan lupa satu hal bahwa organisasi KPK menyangkut soal Dewan Pengawas itu bukan lembaga eksternal itu lembaga internal.

Najwa: Pendapat anda sendiri tentang survey ini bang Arteria?

Arteria: Saya menghormati semua hasil-hasil lembaga survey tetapi kita juga harus katakan Perpu itu diksi hukum dan isunya konstitusional-konstitusional. Kalau isu konstitusional perdebatan kita bukan lembaga survey tetapi lembaga yang berwenang untuk itu. Ini kan domainnya MK, jadi relevansinya adalah tatkala Mahkamah mengatakan putusannya seperti apa Perpunya valid atau tidak.

Najwa: Oke.

Arteria: Kemudian yang kedua,

Najwa: Jadi anda mengartikan ketika orang bilang 76% setuju Presiden mengeluarkan Perpu 70% public menganggap revisi UU KPK melemahkan. Anda memaknai itu sebagai?

Arteria: Tepatnya saya mengatakan bahwa dengan segala hormat saya ke ELS itu tidak bisa dijadikan acuan. Perdebatan diruang public it's okay tapi tatkala seolah-olah dipaksakan sebagai kajian ilmiah yang menjadikan bahan untuk bahan pertimbangan jangan sampai seperti itu.

Najwa: Jadi suara public tidak usah dijadikan bahan pertimbangan?

Arteria: Bukan seperti itu.

Najwa: Saya hanya mengulang yang anda katakan.

Arteria: Tidak didasarkan pada survey. Karena Presiden Jokowi adalah bukan Presiden hasil survey bukan Presiden survey, DPR-RI bukan DPR survey.

Djayadi: Tidak ada lembaga survey yang mengatakan Presiden harus mendengarkan lembaga survey, tidak ada. Lembaga survey itu,

Arteria: Tapi opini yang anda bentuk tatkala Presiden ingin memutuskan menerbitkan Perpu atau tidak, ini juga kan intendensius.

Djayadi: Kita menangkap suara public,

Arteria: Saya mau melanjutkan dulu,

Djayadi: Menangkap suara public itu antara lain lewat survey. Soal mengambil kebijakan pertimbangan atau tidak itu soal lain. Tetapi dalam negar demokrasi salah satu yang dipertimbangkan adalah public.

Arteria: Tidak apa-apa. Jangan bicara demokrasi. Kami juga paham demokrasi.

Suprtaman: Jadi mungkin mbak Nana,

Najwa: Sebentar, sebentar.

Arteria: Kemudian yang kedua,

Najwa: Silahkan dilanjutkan nanti saya kasi Prof Emil.

Arteria: Saya ingin katakan juga bagaimana metodenya. By phone kah? Atau turun lapangan?

Djayadi: Anda mau diskusi metodologi dengan saya?

Arteria: Atau turun lapangan? Iya dong. Harus jelasin jangan belaga intelek. Jelasin dulu. Biasanya ELS turun lapangan sekarang by phone. Saya ingin tanyakan darimana anda tau orang itu tau mengetahui atau paham dengan materi muatan revisi sehingga dia berkesimpulan seperti itu.

Djayadi: Anda pernah survey?

Arteria: Pernah lah. Saya ini wakil rakyat, dipilih pasti lewat survey.

Najwa: Yang survey anda sendiri?

Arteria: Ya tidak, kita nyewa lembaga survey. Tapi kita paham.

Supratman: Mbak Nan gini ya,

Najwa: Jadi bukan anda sendiri?

Arteria: Tapi kami paham. Kan pertanyaannya anda paham dan saya paham.

Najwa: Iya, DPR paham segala hal kita tahu DPR paham segalanya.

Supratman: Mbak Nana,

Najwa: Prof Emil silahkan.

Arteria: Jangan seolah-olah anda yang paham.

Emil: Jadi yang jadi soal adalah ada *credibility gap*. Bung bilang saya dipilih. Yang menjadi persoalannya, apa cara memilih itu bebas dari korupsi?

Arteria: Ya iyalah.

Emil: Ada buku bom,

Arteria: Jangan, prof jangan bilang saya terpilih bebas korupsi atau tidak. Saya yakin.

Emil: Ada laporan demokrasi,

Arteria: Anda bisa menjadi menteri karena proses politik di DPR. Jangan salah.

Emil: Tunggu dulu, demokrasi

Arteria: Jangan sudutkan DPR seperti itu, kasi contoh ke generasi muda kita. Bernegara dengan baik, beradab dengan baik dan beretika dengan baik.

Najwa: Sebentar, oke. Anggota DPR juga memberikan contoh rakyat dengan mendengarkan secara baik. Silahkan.

Arteria: Woi, supporternya supporter apa ini?

Emil: Yang menjadi persoalannya adalah bahwa dalam demokrasi kita ada laporan bahwa ada buku yang namanya demokrasi

Arteria: Tapi jangan bikin,

Najwa: Sebentar.

Emil: Dengar dulu.

Arteria: ya

Emil: Demokrasi forseil dan seluruh yang terjadi di penangkapan di KPK adalah para politisi yang dipilih. Jadi persoalan adalah pemilihan kita yang kita jalankan belum tentu credible. Itu menjadi persoalan. Jadi bung bangga saya dipilih tapi apa betul dipilih secara betul?

Arteria: Iya.

Emil: Berapa ongkos yang bung keluarkan? Darimana uang

Arteria: Kalau saya bisa buktikan,

Najwa: Oke, kita kembali setelah pariwisata. Tetapdi Mata Najwa.